

Efektivitas Program Indonesia Pintar terhadap Partisipasi Sekolah di Kawasan Barat dan Timur Indonesia

Fitri Mulyani¹, Endrizal Ridwan², M.Nazer³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas

fitri.mulyani10@gmail.com

Abstract

Smart Indonesia Program (PIP) is a government program that aims to make the 12-year compulsory education program a success. The PIP program has been running since 2015. However, the Badan Pusat Statistik (BPS) notes that there are still school-age residents who are not attending school, even though the percentage of children not attending school has decreased. This study aims to measure the implementation of PIP and other factors on school participation in two regions, namely the West Indonesia Region (KBI) and the East Indonesia Region (KTI) in 2021. This research uses data from the 2021 National Socio-Economic Survey (Susenas) in the Indonesian Region West (KBI) and Eastern Indonesia Region (KTI). Data analysis used logistic regression method. The results showed that all independent variables, PIP, gender, marital status of head of household, classification of area of residence, per capita expenditure, other social assistance had a significant effect on school enrollment in the Western Regions of Indonesia (KBI) and Eastern Indonesia (KTI). The biggest tendency for children to participate in school is the PIP.

Keywords: *Western Indonesia Region, Eastern Indonesia Region, School Enrollment, Logistic Regression, Per Capita Expenditure.*

Abstrak

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menyukseskan program wajib belajar 12 tahun. Program PIP ini sudah berjalan sejak tahun 2015. Namun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa masih terdapat penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur implementasi PIP dan faktor lain terhadap partisipasi sekolah di dua kawasan yakni Kawasan Indonesia Barat (KBI) dan Kawasan Indonesia Timur (KTI) tahun 2021. Penelitian ini menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2021 di Kawasan Indonesia Barat (KBI) dan Kawasan Indonesia Timur (KTI). Analisis data menggunakan metode regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yaitu PIP, jenis kelamin, status perkawinan KRT, klasifikasi wilayah tempat tinggal, pengeluaran perkaita, bantuan sosial lain berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi sekolah di wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Adapun kecenderungan terbesar anak berpartisipasi sekolah adalah variabel PIP.

Kata kunci: Kawasan Barat Indonesia, Kawasan Indonesia Timur, Partisipasi Sekolah, Regresi Logistik, Pengeluaran Perkapita.

INFEB is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



1. Pendahuluan

Pendidikan adalah salah satu faktor yang memainkan peran penting dalam membawa kohesi sosial dan kemakmuran ekonomi [1]. Semakin tinggi kualitas pendidikan suatu negara maka negara tersebut dapat digolongkan ke negara berkembang atau sedang berkembang [2]. Pada tingkat internasional, isu pendidikan merupakan salah satu isu terpenting yang tertuang didalam program Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan program lanjutan dari program Education for All, Millennium Development Goals (MDGs) [3]. Tujuan keempat pada SDGs berfokus pada bidang pendidikan yakni menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua [4]. Pada tingkat nasional, salah satu tujuan nasional Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa [5]. Tujuan tersebut tertuang dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu berdasarkan UUD 1945 pasal 31 negara menjamin bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya [6]. Negara juga memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional [7]. Namun kesenjangan pendidikan antar kelompok masyarakat masih terjadi saat ini [8]. Menurut BPS rumah tangga yang mampu secara ekonomi memiliki partisipasi sekolah yang lebih baik dibandingkan rumah tangga yang kurang mampu secara ekonomi [9]. Hal ini disebabkan banyaknya biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk menunjang kegiatan pendidikan [10].

Program Cash Conditional Transfer (CCT) dianggap sebagai solusi bagi anak miskin yang ingin melanjutkan sekolah dan kebijakan tersebut telah diterapkan oleh beberapa negara. program CCT yang dilakukan sebagai pilot study di UK yakni Program *Education Maintenance Allowance* (EMA) merupakan program yg tepat untuk meningkatkan partisipasi sekolah dan mengurangi angka putus sekolah [11]. Banyaknya evaluasi yang dilakukan terhadap program CCT yang diberikan pada rumah tangga miskin di Meksiko [12]. Program CCT tersebut dikenal dengan nama Progresa dan telah berhasil meningkatkan tingkat pendaftaran sekolah bagi anak-anak rumah tangga miskin, meskipun peningkatan hanya di tingkat sekolah dasar [13]. Program CCT di Kolombia juga efektif meningkatkan partisipasi sekolah pada anak rumah tangga miskin melalui program *The Familias en Acción programme* [14].

Negara yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi tidak akan mengeluarkan biaya yang besar untuk pengeluaran pendidikan. Oleh karena itu negara yang miskin akan memiliki capaian pendidikan yang lebih rendah dibandingkan negara dengan tingkat kemiskinan yang lebih rendah [15]. Selanjutnya partisipasi sekolah sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan keluarga pada negara berkembang [16]. Kemiskinan juga memiliki hubungan yang erat dengan beberapa karakteristik wilayah, individu dan rumah tangga seperti ketersediaan infrastruktur (jalan, air, listrik), layanan (kesehatan dan pendidikan), kedekatan dengan pasar, aspek demografi, aspek ekonomi, serta aspek sosial [17]. Berkaca dari negara lain, Indonesia mencoba menerapkan hal yang serupa bantuan masyarakat berupa barang seperti subdisi gas LPG maupun bantuan langsung tunai bersyarat (*conditional cash transfer*) CCT yang dinamakan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk rumah tangga miskin ataupun bantuan khusus untuk pendidikan yaitu Bantuan Siswa Miskin (BSM) di tahun 2008.

BSM merupakan bantuan khusus untuk siswa miskin untuk mendukung program wajib belajar yang telah dicanangkan oleh pemerintah [18]. Selanjutnya pemerintah berusaha memperbaiki cakupan dan memperluas manfaat BSM serta mengubah nama BSM menjadi Program Indonesia Pintar atau dikenal dengan nama PIP di tahun 2015. PIP merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. PIP memberikan bantuan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah hingga pendidikan tinggi [19].

Secara rata-rata total penerima PIP dari tahun 2015 hingga tahun 2021 sebesar 17,94 juta siswa. Jika dilihat menurut tingkat pendidikan, penerima manfaat terbanyak adalah siswa SD diikuti oleh siswa SMP dan SMA. Setiap tahun rata-rata yang menerima manfaat PIP ada 10,16 juta siswa SD/sederajat, 4,34 juta siswa SMP/sederajat dan 3,18 juta siswa SMA/sederajat.

Selanjutnya Perkembangan Jumlah Siswa dan Anggaran PIP yang disalurkan Tahun 2015-2021 (Triliun Rupiah) ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1 . Perkembangan Jumlah Siswa dan Anggaran PIP yang disalurkan Tahun 2015-2021 (Triliun Rupiah)

Namun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa masih terdapat penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah. Pada tahun 2015 terdapat 0,91 persen penduduk usia 7-12 tahun, 5,28 persen penduduk usia 13-15 tahun, dan 29,39 persen penduduk usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah. Persentase anak tidak sekolah mengalami penurunan dari tahun ketahun. Pada tahun 2020 tercatat 0,74 persen penduduk usia 7-12 tahun, 4,26 persen penduduk usia 13-15 tahun, dan 27,28 persen penduduk usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah. Walaupun persentase anak tidak sekolah mengalami penurunan, namun kondisi ini masih dikatakan cukup mengkhawatirkan [20].

Partisipasi pendidikan di suatu daerah dapat mengalami perbedaan diakibatkan oleh beberapa faktor yakni karakteristik sosial ekonomi rumah tangga, demografi, pendidikan dan karakteristik daerah. Untuk wilayah Indonesia terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi sekolah baik di kawasan barat Indonesia maupun timur Indonesia. Pertama, aksesibilitas pendidikan yang terbatas di daerah terpencil dan terisolasi. Jarak yang jauh antara sekolah dengan tempat tinggal siswa seringkali menjadi hambatan utama dalam partisipasi sekolah. Kedua, kondisi ekonomi yang rendah di beberapa daerah juga menjadi faktor penghambat partisipasi sekolah. Biaya pendidikan yang tinggi dan keterbatasan sumber daya dapat membuat orang tua enggan mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah. Ketiga, perbedaan budaya dan tradisi di kawasan barat dan timur Indonesia juga dapat mempengaruhi partisipasi sekolah. Beberapa daerah mungkin memiliki kepercayaan dan nilai-nilai yang berbeda terkait dengan pendidikan. Mengacu pada permasalahan tersebut, maka penelitian ini ingin mengetahui implementasi dan penerapan PIP terhadap partisipasi sekolah dan bagaimana kondisi PIP di kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Timur.

2. Metode Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur implementasi PIP terhadap partisipasi sekolah di dua kawasan yakni Kawasan Indonesia Barat (KBI) dan

Kawasan Indonesia Timur (KTI). Kawasan Indonesia dan sisanya sebesar 54% berada di Kawasan Barat Barat (KBI) terdiri dari Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Indonesia (KBI). Selanjutnya persentase observasi berdasarkan wilayah di Indonesia ditampilkan pada Gambar 2.

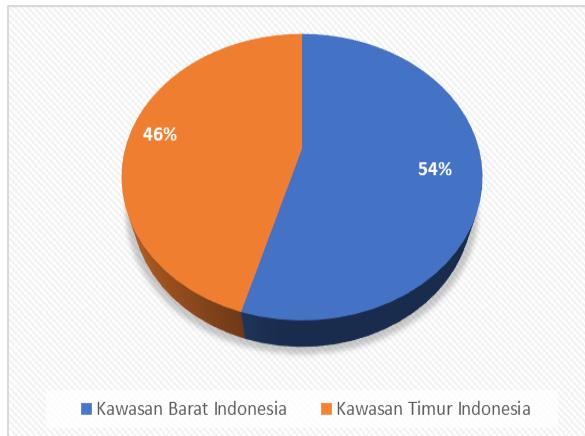
Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten. Sedangkan Kawasan Indonesia Timur (KTI) terdiri dari Keseluruhan provinsi yang ada di Pulau Bali, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku dan Papua. Partisipasi Sekolah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah partisipasi anak yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Partisipasi sekolah yang merupakan variabel terikat dikategorikan menjadi dua : “0” untuk anak yang tidak bersekolah sedangkan “1” anak yang bersekolah. Sementara untuk variabel tidak terikat terdiri dari PIP, jenis kelamin, status kawin kepala rumah tangga, klasifikasi wilayah tempat tinggal, pengeluaran perkapita rumah tangga, bantuan sosial lain selain PIP.

Penelitian ini menggunakan desain cross sectional study. Data yang digunakan adalah data sekunder dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2021. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 451.393 sampel. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan secara umum partisipasi sekolah dan variabel bebas lainnya serta analisis inferensia menggunakan pendekatan ekonometrika dengan metode Binary Regression, yakni model regresi logistik. Regresi logistik digunakan untuk menggambarkan Regresi logistik biner digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel dependen yang bersifat dikotomik dengan variabel independen. Berikut langkah-langkah regresi logistik biner. Melakukan pengujian parameter secara simultan dengan menggunakan uji rasio likelihood untuk mengetahui bagaimana kontribusi variabel independen secara bersama-sama dalam model terhadap partisipasi sekolah di wilayah Indonesia Barat dan Timur tahun 2021. Jika keputusan yang diperoleh yaitu tolak H_0 maka dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Melakukan pengujian parameter secara parsial dengan menggunakan uji Wald untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen terhadap dalam model secara parsial. Menentukan model regresi logistik biner . Melakukan uji kesesuaian model (*goodness of fit*) dengan menggunakan uji Hosmer and Lemeshow untuk mengetahui model yang dibangun telah sesuai dan dimodelkan dengan benar. Membuat tabel klasifikasi untuk melihat keefektifan model yang terbentuk dalam mengklasifikasikan seluruh observasi secara tepat. Melakukan pengukuran rasio kecenderungan (odds ratio) untuk melihat ukuran kecenderungan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3. Hasil dan Pembahasan

Jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 451.393 sampel. Gambar 3 menyajikan distribusi persentase observasi berdasarkan wilayah. Sebanyak 46% observasi berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI)



Gambar 2. Persentase Observasi berdasarkan Wilayah di Indonesia

Distribusi karakteristik sampel pada penelitian ini. Sebanyak 25,38% observasi pada wilayah KBI yang berpartisipasi sekolah sedangkan pada wilayah KTI sebesar 28,38 persen. Rata-rata observasi yang mendapat bantuan program PIP dari pemerintah pada wilayah KBI sebesar 11,94% dan wilayah KTI sebesar 11,71%. Pada wilayah KBI sebanyak 49,95% observasi berjenis kelamin laki-laki dan 50,05% berjenis kelamin perempuan sedangkan wilayah KTI sebesar 50,34% berjenis kelamin laki-laki dan 49,66% perempuan. Dari sampel penelitian juga dapat dilihat sebesar 48,96% sampel di wilayah KBI berstatus kawin dan pada wilayah KTI sebesar 45,40%. Jika dilihat dari wilayah tempat tinggal, 49,31% sampel tinggal di wilayah perkotaan pada KBI sedangkan 50,69% tinggal di wilayah perdesaan. Untuk wilayah KTI sebesar 31,04% tinggal di wilayah perkotaan dan 68,96% tinggal di wilayah perdesaan. Jika dilihat sebaran pengeluaran perkapita rumah tangga sebanyak 89,98% sampel dibawah Garis Kemiskinan (GK) pada wilayah KBI dan 90,94% sampel pada wilayah KTI. Berdasarkan pemberian bantuan sosial lain selain PIP oleh pemerintah, sebanyak 7,66% mendapat bantuan pada wilayah KBI dan 7,94% di wilayah KTI. Selanjutnya karakteristik variabel penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Variabel Penelitian

Variabel	Kategori	KBI (%)	KTI (%)
Sekolah	1. Berpartisipasi	25,38	28,38
	0. Tidak Berpartisipasi	74,62	71,62
PIP_	1. Ya	11,94	11,71
	0. Tidak	88,06	88,29
Jeniskelamin	1.Laki-laki	49,95	50,34
	0. Perempuan	50,05	49,66
kawin	1.Kawin	48,96	45,40
	0. Lainnya	51,04	54,60
kotadesa	1. Perkotaan	49,31	31,04
	0. Perdesaan	50,69	68,96
pengeluaran	1. dibawah GK	89,98	90,94
	0. diatas GK	10,02	9,06
bansos	1. Ya	7,66	7,94
	0. Tidak	92,34	92,06
Total		100,00	

Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas yakni PIP, jenis kelamin, status perkawinan, klasifikasi wilayah tempat tinggal, dan

pengeluaran perkapita rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap partisipasi sekolah baik di wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Selanjutnya hasil uji parsial dan odds ratio KBI disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Parsial dan Odds Ratio KBI

Variabel	Kategori	Partisipasi Sekolah Kawasan Barat Indonesia (KBI)			
		Koef	z	P> z	Odds Ratio
Constanta	Ya	1,166	61,81	0,000	3,210
PIP	Tidak (Reff)	2,734	81,00	0,000	15,389
Jenis Kelamin	Laki -Laki	-0,283	-29,65	0,000	0,754
Status Perkawinan	Kawin	-3,164	####	0,000	0,423
Kota Desa	Lainnya (Reff)	0,051	5,30	0,000	1,052
Pengeluaran	Kota Desa (Reff)	-0,276	-15,93	0,000	0,759
Bantuan Sosial Lain Selain PIP	Ya	-0,215	-12,33	0,000	0,806
	Tidak (Reff)				
Pseudo R2		0,137			
Correctly Classified		73,25%			

Selanjutnya hasil uji parsial dan odds ratio KTI disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Parsial dan Odds Ratio KTI

Variabel	Kategori	Partisipasi Sekolah Kawasan Timur Indonesia (KTI)			
		Koefisien	z	P> z	Odds Ratio
Constanta	Ya	0,958	44,64	0,000	2,606
PIP	Tidak (Reff)	2,461	73,58	0,000	11,715
Jenis Kelamin	Laki -Laki	-0,301	-28,85	0,000	0,740
Status Perkawinan	Kawin	-2,950	-111,08	0,000	0,052
Kota Desa	Lainnya (Reff)	0,219	18,91	0,000	1,244
Pengeluaran	Kota Desa (Reff)	-0,079	-3,87	0,000	0,924
Bantuan Sosial Lain Selain PIP	Ya			0,000	0,876
	Tidak (Reff)	-0,132	-7,09		
Pseudo R2		0,1368			
Correctly Classified		73,26%			

Untuk melihat besar kecendrungan variabel bebas terhadap partisipasi sekolah dapat dilihat dari nilai odds ratio (OR) atau rasio kecendrungan. Pada tabel 2 dan tabel 3. Nilai odds ratio dari variabel PIP di wilayah KBI sebesar 15,389, artinya anak yang mendapatkan program PIP memiliki kecenderungan 15,389 kali lebih besar untuk bersekolah dibandingkan anak yang tidak mendapat program PIP. Sedangkan pada wilayah KTI Nilai odds ratio dari variabel PIP di wilayah sebesar 11,715 artinya anak yang mendapatkan program PIP wilayah KTI memiliki kecenderungan 11,715 kali lebih besar untuk bersekolah dibandingkan anak yang tidak mendapat program PIP. PIP memiliki dampak yang positif terhadap partisipasi sekolah yang

tergambar dari nilai koefisien yang positif dan signifikan di kedua wilayah baik KBI maupun KTI. Hasil ini selaras dengan teori dan tujuan pemerintah dimana anak memanfaatkan dan mendapatkan program PIP memiliki persentase yang lebih tinggi untuk berpartisipasi sekolah dibandingkan anak yang tidak memanfaatkan dan mendapatkan program PIP. Oleh karena itu, bantuan dari PIP sangat dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi sekolah dan mendukung agar program wajib belajar 12 tahun dapat tercapai. Program Indonesia Pintar memiliki tujuan untuk membantu anak usia sekolah agar mendapatkan pendidikan.

Kemudian variabel jenis kelamin dengan nilai odds ratio sebesar 0,753 diwilayah KBI dan nilai odds ratio sebesar 0,7403 wilayah KTI artinya anak dengan jenis kelamin laki-laki memiliki kecenderungan 0,753 diwilayah KBI dan 0,7403 wilayah KTI untuk berpartisipasi sekolah dibandingkan anak dengan jenis kelamin perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa jenis kelamin juga berpengaruh terhadap partisipasi untuk bersekolah. Selanjutnya pada variabel status perkawinan KRT kecendrungan KRT berstatus kawin 0,42 kali pada wilayah KBI dan 0,05 kali lebih besar kecendrungannya untuk berpartisipasi sekolah.

Variabel wilayah atau daerah tempat tinggal juga memiliki arah yang positif dan signifikan memengaruhi partisipasi sekolah baik diwilayah KBI dan KTI. Anak yang tinggal di wilayah perkotaan 1,05 kali cenderung berpartisipasi sekolah pada wilayah KBI dan 1,24 kali diwilayah KTI dibandingkan yang tinggal di daerah perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah tempat tinggal juga berpengaruh terhadap partisipasi sekolah. Ketersediaan fasilitas pendidikan dan kemudahan akses pendidikan seperti keadaan geografis memungkinkan tingginya kecenderungan partisipasi sekolah.

Sementara itu dari sisi ekonomi, variabel pengeluaran perkapita juga secara statistik signifikan memengaruhi partisipasi sekolah. Variabel pengeluaran perkapita dipakai sebagai proksi dari pendapatan. yang mana variabel ini sudah mempertimbangkan jumlah anggota rumah tangga dalam suatu rumah tangga. Variabel pengeluaran perkapita menunjukkan arah negatif dan signifikan, artinya pengeluaran perkapita dibawah Garis Kemiskinan (GK) cenderung untuk tidak bersekolah dibandingkan rumah tangga yang pengeluaran perkapitanya diatas Garis Kemiskinan. Selanjutnya variabel bantuan sosial lain memiliki kecendrungan sebesar 0,806 kali pada wilayah KBI dan 0,876 pada wilayah KTI.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen yaitu PIP, jenis kelamin, status perkawinan KRT, klasifikasi wilayah tempat tinggal, pengeluaran perkapita, bantuan sosial lain berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi sekolah di wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Adapun kecenderungan terbesar anak berpartisipasi sekolah adalah variabel PIP. Oleh karena itu, bantuan dari PIP

sangat dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi sekolah dan mendukung agar program wajib belajar 12 tahun dapat tercapai.

Daftar Rujukan

- [1] Iqbal, N., & Nawaz, S. (2015). *Population & Health Working Paper Series Pakistan Institute of Development Economics Spatial Differences and Socio-economic Determinants of Health Poverty*. DOI: <https://doi.org/10.30541/v56i3pp.221-248> .
- [2] Nawaz, S., & Iqbal, N. (2016). *Education Poverty in Pakistan : A Spatial Analysis at District Level*. 10(2), 270–287. DOI: <https://doi.org/10.1177/0973703016674081> .
- [3] Mankiw, N. G. ;, Romer, D., & Weil, D. N. (1992). A Contribution to The Empirics of Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 107(May), 407–437. DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2118477> .
- [4] Dearden, L., Emmerson, C., Frayne, C., & Meghir, C. (2009). Conditional Cash Transfers and School Dropout Rates. *Journal of Human Resources*, 44(4), 827–857. DOI: <https://doi.org/10.1353/jhr.2009.0013> .
- [5] Schultz, T. P. (2004). School Subsidies for The Poor: Evaluating The Mexican Progresa Poverty Program. *Journal of Development Economics*, 74(1), 199–250. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2003.12.009> .
- [6] Dubois, P., de Janvry, A., & Sadoulet, E. (2012). Effects on school enrollment and performance of a conditional cash transfer program in Mexico. *Journal of Labor Economics*, 30(3), 555–589. DOI : <https://doi.org/10.1086/664928> .
- [7] Attanasio, O., Fitzsimons, E., Gomez, A., Meghir, C., Mesnard, A., & Gutiérrez, M. I. (2010). Children's Schooling and Work In The Presence of A Conditional Cash Transfer Program In Rural Colombia. *Economic Development and Cultural Change*, 58(2), 181–210. DOI: <https://doi.org/10.1086/648188> .
- [8] Alberto, C., Bandala, J., & Andrade, L. A. (2017). Education, Poverty, and The Trap of Poor Countries in The Face of Development. *Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science*, 10(4). DOI: <https://doi.org/10.7160/eriesj.2017.100402> .
- [9] Glewwe, P., & Kremer, M. (2006). Schools, Teachers, and Education Outcomes in Developing Countries. *Handbook of the Economics of Education*, 2(06), 945–1017. DOI: [https://doi.org/10.1016/S1574-0692\(06\)02016-2](https://doi.org/10.1016/S1574-0692(06)02016-2) .
- [10]Rasbin. (2018). Peran Pemerintah Daerah dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran: Studi di Kota Yogyakarta dan Malang. *Journal Kajian*, 129–142. DOI: <https://doi.org/10.22212/kajian.v23i2.1878> .
- [11]Nazer, M., Ekonomi, F., & Andalas, U. (2016). Analisis Konsumsi Energi Rumah Tangga Perkotaan di Indonesia : Periode Tahun 2008 dan 2011. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 16(2). DOI: <https://doi.org/10.21002/jepi.v16i2.04> .
- [12]Ikhsanti, Nurul; Ridwan, Endrizal; Prima Putra, F. (2023). Dampak Program Keluarga Harapan terhadap Kesehatan Ibu dan Anak. *Edunomika*, 07(02), 1–10. DOI: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jie.v7i2.8871> .
- [13]Resina, D., Kamarni, N., & Putra, F. P. (2023). Program Keluarga Harapan: Can It Reduce Poverty and Increase Welfare in Indonesia? Household Level Evidence from Districts/Cities in Indonesia on 2019. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 14 (2)(225), 277–289. DOI: <https://doi.org/10.33059/jseb.v14i2.6126> .
- [14]Caniago, P., & Sari, D. T. (2021). Education Cash Transfer and High School Enrollment in Indonesia. *Economics Development Analysis*, 10(25), 184–204. DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/edaj.v10i2.43922>
- [15]Filmer, D., & Bank, T. W. (2007). *The Journal of Development If you build it , will they come ? School availability and school enrolment in 21 poor countries. October 2014*, 37–41. DOI: <https://doi.org/10.1080/00220380701384588> .
- [16]Nicholas;Emily. (2013). *Factors Influencing Household Decisions on Access to Primary School Education in Kenya : Case Study of Uasin Gishu West District*. 3(7), 163–173. DOI: <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v3-i7/18> .
- [17]Perdana, N. S. (2015). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Aksesibilitas Memperoleh Pendidikan Untuk Anak-Anak di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, Vol. 21, N, 279–298. DOI: <https://doi.org/10.24832/jpnk.v21i3.191> .
- [18]Iskandar. (2019). *Islamic Economics as A New Current of Economic Development in Indonesia*. 9(2), 150–158. DOI: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18326/muqtasid.v9i2.150-158>
- [19]Rizal, R. N. (2015). Apakah Jenjang Pendidikan Dasar Tenaga Kerja Berperan dalam Mengurangi Kemiskinan di Indonesia? *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 16(1), 15–30. DOI: <https://doi.org/10.21002/jepi.v16i1.596>
- [20]Hosmer, Lemeshow, D. (2013). Applied Logistic Regression. DOI: <https://doi.org/10.1002/9781118548387> .